



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1218, 2016

BKPM. Urusan Pemerintahan. Hasil Pemetaan.
Penetapan.

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI BIDANG PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 107 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PENETAPAN HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

Pemetaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal adalah hasil validasi untuk urusan penanaman modal di daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal berdasarkan nilai variabel urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

Pasal 2

Nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan nilai hasil pemetaan berdasarkan indikator dan kelas interval urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

Pasal 3

Hasil pemetaan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal merupakan acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menetapkan tipe perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

Pasal 4

- (1) Urusan pemerintahan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kewenangan wajib non pelayanan dasar yang diwadahi dalam bentuk dinas.
- (2) Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal di daerah provinsi dan kabupaten/kota dibagi dalam 4 (empat) tipologi.
- (3) Tipologi dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Dinas Tipe A untuk mewadahi pelaksanaan tingkat dan intensitas beban kerja besar;
 - b. Dinas Tipe B untuk mewadahi pelaksanaan tingkat dan intensitas beban kerja sedang;
 - c. Dinas Tipe C untuk mewadahi pelaksanaan tingkat dan intensitas beban kerja kecil; dan
 - d. Dinas Tipe C dengan nilai pemetaan kurang dari 401 (empat ratus satu) untuk mewadahi pelaksanaan tingkat dan intensitas beban kerja sangat kecil serta dimungkinkan menerima tambahan urusan pemerintahan lainnya yang serumpun.
- (4) Tambahan urusan pemerintahan lainnya yang serumpun dengan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, yaitu:
 - a. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. Perindustrian;
 - c. Perdagangan;
 - d. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - e. Transmigrasi; dan
 - f. Tenaga kerja.

Pasal 5

- (1) Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan

nonperizinan melekat pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

- (2) Besaran tipologi unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti besaran tipologi pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

Pasal 6

Hasil pemetaan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 7

Evaluasi terhadap hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Hasil pemetaan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal digunakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menetapkan kelembagaan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pedoman nomenklatur dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal dan unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pedoman nomenklatur dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Dalam hal kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Daerah masih terbatas, tipe Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat diturunkan dari hasil pemetaan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal belum dilakukan pemetaan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat menyampaikan data indikator variabel kepada Kementerian Dalam Negeri dengan tembusan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (2) Data indikator variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi sebagai dasar penetapan tipologi dan nomenklatur kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2016

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG PENETAPAN PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN
 DAERAH DI BIDANG PENANAMAN MODAL

HASIL PEMETAAN INTENSITAS DAN BEBAN KERJA
 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
 PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA TAHUN 2016

NO.	PROVINSI/KAPUBATEN KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
1	PROVINSI ACEH	858	BESAR
1.1	Kab. Aceh Barat	770	SEDANG
1.2	Kab. Aceh Besar	682	SEDANG
1.3	Kab. Aceh Selatan	704	SEDANG
1.4	Kab. Aceh Singkil	532	KECIL
1.5	Kab. Aceh Tengah	880	BESAR
1.6	Kab. Aceh Tenggara	440	KECIL
1.7	Kab. Aceh Timur	836	BESAR
1.8	Kab. Aceh Utara	814	BESAR
1.9	Kab. Bireuen	1.056	BESAR
1.10	Kab. Pidie	836	BESAR
1.11	Kab. Simeulue	602	SEDANG
1.12	Kota Banda Aceh	1.012	BESAR
1.13	Kota Sabang	363	SANGAT KECIL
1.14	Kota Langsa	462	KECIL
1.15	Kota Lhokseumawe	803	BESAR
1.16	Kab. Gayo Lues	638	SEDANG
1.17	Kab. Aceh Barat Daya	726	SEDANG
1.18	Kab. Aceh Jaya	814	BESAR
1.19	Kab. Nagan Raya	682	SEDANG
1.20	Kab. Aceh Tamiang	616	SEDANG
1.21	Kab. Bener Meriah	682	SEDANG
1.22	Kab. Pidie Jaya	792	SEDANG
1.23	Kota Subulussalam	517	SEDANG
2	PROVINSI SUMATERA UTARA	836	BESAR
2.1	Kab. Asahan	880	BESAR
2.2	Kab. Dairi	792	SEDANG
2.3	Kab. Deli Serdang	1.100	BESAR
2.4	Kab. Karo	858	BESAR
2.5	Kab. Labuhan Batu	792	SEDANG
2.6	Kab. Langkat	858	BESAR
2.7	Kab. Mandailing Natal	792	SEDANG
2.8	Kab. Nias	1.023	BESAR
2.9	Kab. Simalungun	836	BESAR
2.10	Kab. Tapanuli Selatan	792	SEDANG
2.11	Kab. Tapanuli Tengah	704	SEDANG

NO.	PROVINSI/KAPUBATEN KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
2.12	Kab. Tapanuli Utara	836	BESAR
2.13	Kab. Toba Samosir	781	SEDANG
2.14	Kota Binjai	770	SEDANG
2.15	Kota Medan	1.012	BESAR
2.16	Kota Pematang Siantar	836	BESAR
2.17	Kota Sibolga	693	SEDANG
2.18	Kota Tanjung Balai	682	SEDANG
2.19	Kota Tebing Tinggi	649	SEDANG
2.20	Kota Padang Sidempuan	638	SEDANG
2.21	Kab. Pakpak Bharat	616	SEDANG
2.22	Kab. Nias Selatan	924	BESAR
2.23	Kab. Humbang Hasundutan	759	SEDANG
2.24	Kab. Serdang Bedagai	638	SEDANG
2.25	Kab. Samosir	693	SEDANG
2.26	Kab. Batu Bara	704	SEDANG
2.27	Kab. Padang Lawas	748	SEDANG
2.28	Kab. Padang Lawas Utara	858	BESAR
2.29	Kab. Labuhan Batu Selatan	715	SEDANG
2.30	Kab. Labuhan Batu Utara	572	KECIL
2.31	Kab. Nias Utara	980	BESAR
2.32	Kab. Nias Barat	798	SEDANG
2.33	Kota Gunung Sitoli	980	BESAR
3	PROVINSI SUMATERA BARAT	770	SEDANG
3.1	Kab. Lima Puluh Kota	880	BESAR
3.2	Kab. Agam	880	BESAR
3.3	Kab. Kepulauan Mentawai	840	BESAR
3.4	Kab. Padang Pariaman	902	BESAR
3.5	Kab. Pasaman	770	SEDANG
3.6	Kab. Pesisir Selatan	880	BESAR
3.7	Kab. Sijunjung	781	SEDANG
3.8	Kab. Solok	682	SEDANG
3.9	Kab. Tanah Datar	814	BESAR
3.10	Kota Bukit Tinggi	858	BESAR
3.11	Kota Padang Panjang	616	SEDANG
3.12	Kota Padang	1.034	BESAR
3.13	Kota Payakumbuh	759	SEDANG
3.14	Kota Sawahlunto	605	SEDANG
3.15	Kota Solok	638	SEDANG
3.16	Kota Pariaman	649	SEDANG
3.17	Kab. Pasaman Barat	858	BESAR
3.18	Kab. Dharmasraya	869	BESAR
3.19	Kab. Solok Selatan	759	SEDANG
4	PROVINSI RIAU	990	BESAR
4.1	Kab. Bengkalis	660	SEDANG
4.2	Kab. Indragiri Hilir	814	BESAR
4.3	Kab. Indragiri Hulu	902	BESAR
4.4	Kab. Kampar	880	BESAR
4.5	Kab. Kuantan Singingi	440	KECIL
4.6	Kab. Pelalawan	792	SEDANG
4.7	Kab. Rokan Hilir	418	KECIL

NO.	PROVINSI/KAPUBATEN KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
4.8	Kab. Rokan Hulu	814	BESAR
4.9	Kab. Siak	836	BESAR
4.10	Kab. Dumai	814	BESAR
4.11	Kota Pekanbaru	1.012	BESAR
4.12	Kab. Kepulauan Meranti	616	SEDANG
5	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	854	BESAR
5.1	Kab. Natuna	812	BESAR
5.2	Kab. Kep. Anambas	490	KECIL
5.3	Kab. Karimun	952	BESAR
5.4	Kota Batam	1.288	BESAR
5.5	Kota Tanjung Pinang	882	BESAR
5.6	Kab. Lingga	476	KECIL
5.7	Kab. Bintan	1.036	BESAR
6	PROVINSI JAMBI	737	SEDANG
6.1	Kab. Batanghari	638	SEDANG
6.2	Kab. Bungo	858	BESAR
6.3	Kab. Kerinci	484	KECIL
6.4	Kab. Merangin	748	SEDANG
6.5	Kab. Muaro Jambi	704	SEDANG
6.6	Kab. Sarolangun	440	KECIL
6.7	Kab. Tanjung Jabung Barat	616	SEDANG
6.8	Kab. Tanjung Jabung Timur	814	BESAR
6.9	Kab. Tebo	616	SEDANG
6.10	Kota Jambi	990	BESAR
6.11	Kota Sungai Penuh	737	SEDANG
7	PROVINSI SUMATERA SELATAN	803	BESAR
7.1	Kab. Lahat	924	BESAR
7.2	Kab. Musi Banyuasin	880	BESAR
7.3	Kab. Musi Rawas	704	SEDANG
7.4	Kab. Muara Enim	946	BESAR
7.5	Kab. Ogan Komering Ilir	858	BESAR
7.6	Kab. Ogan Komering Ulu	440	KECIL
7.7	Kota Palembang	1.078	BESAR
7.8	Kota Pagar Alam	759	SEDANG
7.9	Kota Lubuk Linggau	737	SEDANG
7.10	Kota Prabumulih	836	BESAR
7.11	Kab. Banyuasin	1.034	BESAR
7.12	Kab. Ogan Ilir	440	KECIL
7.13	Kab. OKU Timur	946	BESAR
7.14	Kab. OKU Selatan	352	SANGAT KECIL
7.15	Kab. Empat Lawang	660	SEDANG
7.16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	737	SEDANG
7.17	Kab. Musi Rawas Utara	605	SEDANG
8	PROVINSI BANGKA BELITUNG	910	BESAR
8.1	Kab. Bangka	1.064	BESAR
8.2	Kab. Belitung	644	SEDANG
8.3	Kab. Pangkal Pinang	1.148	BESAR
8.4	Kab. Bangka Selatan	938	BESAR
8.5	Kab. Bangka Tengah	770	SEDANG
8.6	Kab. Bangka Barat	966	BESAR

NO.	PROVINSI/KAPUBATEN KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
8.7	Kab. Belitung Timur	630	SEDANG
9	PROVINSI BENGKULU	770	SEDANG
9.1	Kab. Bengkulu Selatan	671	SEDANG
9.2	Kab. Bengkulu Utara	616	SEDANG
9.3	Kab. Rejang Lebong	440	KECIL
9.4	Kab. Bengkulu	858	BESAR
9.5	Kab. Kaur	319	SANGAT KECIL
9.6	Kab. Seluma	605	SEDANG
9.7	Kab. Mukomuko	781	SEDANG
9.8	Kab. Lebong	385	SANGAT KECIL
9.9	Kab. Kepahiang	418	KECIL
9.10	Kab. Bengkulu Tengah	759	SEDANG
10	PROVINSI LAMPUNG	1.078	BESAR
10.1	Kab. Lampung Barat	770	SEDANG
10.2	Kab. Lampung Selatan	660	SEDANG
10.3	Kab. Lampung Tengah	814	BESAR
10.4	Kab. Lampung Utara	880	BESAR
10.5	Kab. Lampung Timur	462	KECIL
10.6	Kab. Tanggamus	704	SEDANG
10.7	Kab. Tulang Bawang	748	SEDANG
10.8	Kab. Way Kanan	726	SEDANG
10.9	Kab. Bandar Lampung	1.078	BESAR
10.10	Kab. Metro	737	SEDANG
10.11	Kab. Pesawaran	792	SEDANG
10.12	Kab. Pringsewu	748	SEDANG
10.13	Kab. Mesuji	715	SEDANG
10.14	Kab. Tulang Bawang Barat	858	BESAR
10.15	Kab. Pesisir Barat	715	SEDANG
11	PROVINSI JAWA BARAT	1.000	BESAR
11.1	Kab. Bandung	880	BESAR
11.2	Kab. Bekasi	820	BESAR
11.3	Kab. Bogor	1.000	BESAR
11.4	Kab. Ciamis	820	BESAR
11.5	Kab. Cianjur	900	BESAR
11.6	Kab. Cirebon	920	BESAR
11.7	Kab. Garut	900	BESAR
11.8	Kab. Indramayu	910	BESAR
11.9	Kab. Karawang	1.000	BESAR
11.10	Kab. Kuningan	960	BESAR
11.11	Kab. Majalengka	900	BESAR
11.12	Kab. Purwakarta	840	BESAR
11.13	Kab. Subang	840	BESAR
11.14	Kab. Sukabumi	860	BESAR
11.15	Kab. Sumedang	860	BESAR
11.16	Kab. Tasikmalaya	660	SEDANG
11.17	Kota Bandung	1.045	BESAR
11.18	Kota Bekasi	990	BESAR
11.19	Kota Bogor	990	BESAR
11.20	Kota Cirebon	880	BESAR
11.21	Kota Depok	979	BESAR

NO.	PROVINSI/KAPUBATEN KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
11.22	Kota Sukabumi	638	SEDANG
11.23	Kota Cimahi	792	SEDANG
11.24	Kota Tasikmalaya	715	SEDANG
11.25	Kota Banjar	737	SEDANG
11.26	Kab. Bandung Barat	780	SEDANG
11.27	Kab. Pangandaran	700	SEDANG
12	PROVINSI BANTEN	1.000	BESAR
12.1	Kab. Lebak	780	SEDANG
12.2	Kab. Pandeglang	1.000	BESAR
12.3	Kab. Serang	850	BESAR
12.4	Kab. Tangerang	1.000	BESAR
12.5	Kota Cilegon	869	BESAR
12.6	Kota Tangerang	891	BESAR
12.7	Kota Serang	913	BESAR
12.8	Kota Tangerang Selatan	1.056	BESAR
13	PROVINSI JAWA TENGAH	860	BESAR
13.1	Kab. Banjarnegara	480	KECIL
13.2	Kab. Banyumas	840	BESAR
13.3	Kab. Batang	720	SEDANG
13.4	Kab. Blora	740	SEDANG
13.5	Kab. Boyolali	800	SEDANG
13.6	Kab. Brebes	720	SEDANG
13.7	Kab. Cilacap	1.000	BESAR
13.8	Kab. Demak	860	BESAR
13.9	Kab. Grobogan	780	SEDANG
13.10	Kab. Jepara	660	SEDANG
13.11	Kab. Karanganyar	620	SEDANG
13.12	Kab. Kebumen	860	BESAR
13.13	Kab. Kendal	760	SEDANG
13.14	Kab. Klaten	640	SEDANG
13.15	Kab. Kudus	720	SEDANG
13.16	Kab. Magelang	800	SEDANG
13.17	Kab. Pati	720	SEDANG
13.18	Kab. Pekalongan	640	SEDANG
13.19	Kab. Pemasang	660	SEDANG
13.20	Kab. Purbalingga	780	SEDANG
13.21	Kab. Purworejo	740	SEDANG
13.22	Kab. Rembang	780	SEDANG
13.23	Kab. Semarang	720	SEDANG
13.24	Kab. Sragen	960	BESAR
13.25	Kab. Sukoharjo	690	SEDANG
13.26	Kab. Tegal	720	SEDANG
13.27	Kab. Temanggung	660	SEDANG
13.28	Kab. Wonogiri	880	BESAR
13.29	Kab. Wonosobo	720	SEDANG
13.30	Kota Magelang	693	SEDANG
13.31	Kota Pekalongan	737	SEDANG
13.32	Kota Salatiga	660	SEDANG
13.33	Kota Semarang	1.056	BESAR
13.34	Kota Surakarta	880	BESAR

NO.	PROVINSI/KAPUBATEN KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
13.35	Kota Tegal	704	SEDANG
14	PROVINSI D.I YOGYAKARTA	-	*) TIDAK TERPETAKAN
14.1	Kab. Bantul	830	BESAR
14.2	Kab. Gunung Kidul	920	BESAR
14.3	Kab. Kulon Progo	950	BESAR
14.4	Kab. Sleman	830	BESAR
14.5	Kota Yogyakarta	627	SEDANG
15	PROVINSI JAWA TIMUR	880	BESAR
15.1	Kab. Bangkalan	500	KECIL
15.2	Kab. Banyuwangi	860	BESAR
15.3	Kab. Blitar	440	KECIL
15.4	Kab. Bojonegoro	780	SEDANG
15.5	Kab. Bondowoso	800	SEDANG
15.6	Kab. Gresik	780	SEDANG
15.7	Kab. Jember	420	KECIL
15.8	Kab. Jombang	620	SEDANG
15.9	Kab. Kediri	880	BESAR
15.10	Kab. Lamongan	680	SEDANG
15.11	Kab. Lumajang	420	KECIL
15.12	Kab. Madiun	580	KECIL
15.13	Kab. Magetan	720	SEDANG
15.14	Kab. Malang	840	BESAR
15.15	Kab. Mojokerto	860	BESAR
15.16	Kab. Nganjuk	1.000	BESAR
15.17	Kab. Ngawi	980	BESAR
15.18	Kab. Pacitan	760	SEDANG
15.19	Kab. Pamekasan	740	SEDANG
15.20	Kab. Pasuruan	860	BESAR
15.21	Kab. Ponorogo	700	SEDANG
15.22	Kab. Probolinggo	880	BESAR
15.23	Kab. Sampang	960	BESAR
15.24	Kab. Sidoarjo	940	BESAR
15.25	Kab. Situbondo	720	SEDANG
15.26	Kab. Sumenep	420	KECIL
15.27	Kab. Trenggalek	780	SEDANG
15.28	Kab. Tuban	660	SEDANG
15.29	Kab. Tulungagung	880	BESAR
15.30	Kota Blitar	759	SEDANG
15.31	Kota Kediri	902	BESAR
15.32	Kota Madiun	484	KECIL
15.33	Kota Malang	946	BESAR
15.34	Kota Mojokerto	660	SEDANG
15.35	Kota Pasuruan	737	SEDANG
15.36	Kota Probolinggo	814	BESAR
15.37	Kota Surabaya	1.034	BESAR
15.38	Kota Batu	792	SEDANG
16	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	770	SEDANG
16.1	Kab. Bengkayang	420	KECIL
16.2	Kab. Landak	792	SEDANG
16.3	Kab. Kapuas Hulu	440	KECIL

NO.	PROVINSI/KAPUBATEN KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
16.4	Kab. Ketapang	792	SEDANG
16.5	Kab. Mempawah	704	SEDANG
16.6	Kab. Sambas	484	KECIL
16.7	Kab. Sanggau	1.036	BESAR
16.8	Kab. Sintang	704	SEDANG
16.9	Kab. Pontianak	858	BESAR
16.10	Kota Singkawang	660	SEDANG
16.11	Kab. Sekadau	737	SEDANG
16.12	Kab. Melawi	704	SEDANG
16.13	Kab. Kayong Utara	682	SEDANG
16.14	Kab. Kubu Raya	484	KECIL
17	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1.012	BESAR
17.1	Kab. Barito Selatan	616	SEDANG
17.2	Kab. Barito Utara	836	BESAR
17.3	Kab. Kapuas	748	SEDANG
17.4	Kab. Kotawaringin Barat	638	SEDANG
17.5	Kab. Kotawaringin Timur	814	BESAR
17.6	Kota Palangkaraya	990	BESAR
17.7	Kab. Katingan	814	BESAR
17.8	Kab. Seruyan	682	SEDANG
17.9	Kab. Sukamara	682	SEDANG
17.10	Kab. Lamandau	803	BESAR
17.11	Kab. Gunung Mas	704	SEDANG
17.12	Kab. Pulang Pisau	803	BESAR
17.13	Kab. Murung Raya	814	BESAR
17.14	Kab. Barito Timur	605	SEDANG
18	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	704	KECIL
18.1	Kab. Banjar	814	BESAR
18.2	Kab. Barito Kuala	638	SEDANG
18.3	Kab. Hulu Sungai Selatan	704	SEDANG
18.4	Kab. Hulu Sungai Tengah	352	SANGAT KECIL
18.5	Kab. Hulu Sungai Utara	704	SEDANG
18.6	Kab. Kota Baru	836	BESAR
18.7	Kab. Tabalong	704	SEDANG
18.8	Kab. Tanah Laut	792	SEDANG
18.9	Kab. Tapin	616	SEDANG
18.10	Kota Banjar Baru	902	BESAR
18.11	Kota Banjarmasin	957	BESAR
18.12	Kab. Balangan	726	SEDANG
18.13	Kab. Tanah Bumbu	748	SEDANG
19	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	838	BESAR
19.1	Kab. Kutai Kartanegara	1.078	BESAR
19.2	Kab. Kutai Barat	726	SEDANG
19.3	Kab. Kutai Timur	660	SEDANG
19.4	Kab. Paser	682	SEDANG
19.5	Kota Balikpapan	1.078	BESAR
19.6	Kota Bontang	781	SEDANG
19.7	Kota Samarinda	770	SEDANG
19.8	Kab. Berau	770	SEDANG
19.9	Kab. Penajam Paser Utara	462	KECIL

NO.	PROVINSI/KAPUBATEN KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
19.10	Kab. Mahakam Ulu	462	KECIL
20	PROVINSI KALIMANTAN UTARA	854	BESAR
20.1	Kab. Bulungan	952	BESAR
20.2	Kab. Malinau	532	KECIL
20.3	Kab. Nunukan	672	SEDANG
20.4	Kab. Tarakan	704	SEDANG
20.5	Kab. Tana Tidung	728	SEDANG
21	PROVINSI SULAWESI UTARA	1.022	BESAR
21.1	Kab. Bolaang Mongondow	561	KECIL
21.2	Kab. Minahasa	528	KECIL
21.3	Kab. Kepulauan Sangihe	910	BESAR
21.4	Kota Bitung	847	BESAR
21.5	Kota Manado	286	SANGAT SANGAT KECIL
21.6	Kab. Kepulauan Talaud	854	BESAR
21.7	Kab. Minahasa Selatan	528	KECIL
21.8	Kota Tomohon	748	SEDANG
21.9	Kab. Minahasa Utara	473	KECIL
21.10	Kota Kotamobagu	693	SEDANG
21.11	Kab. Bolaang Mongondow Utara	638	SEDANG
21.12	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Bitaro	476	KECIL
21.13	Kab. Minahasa Tenggara	759	SEDANG
21.14	Kab. Bolaang Mangondow Timur	792	SEDANG
21.15	Kab. Bolaang Mangondow Selatan	352	SANGAT KECIL
22	PROVINSI GORONTALO	704	SEDANG
22.1	Kab. Boalemo	770	SEDANG
22.2	Kab. Gorontalo	770	SEDANG
22.3	Kota Gorontalo	792	SEDANG
22.4	Kab. Pohuwato	737	SEDANG
22.5	Kab. Bone Bolango	649	SEDANG
22.6	Kab. Gorontalo Utara	704	SEDANG
23	PROVINSI SULAWESI TENGAH	979	BESAR
23.1	Kab. Banggai	748	SEDANG
23.2	Kab. Banggai Kepulauan	825	BESAR
23.3	Kab. Buol	924	BESAR
23.4	Kab. Toli-Toli	869	BESAR
23.5	Kab. Donggala	858	BESAR
23.6	Kab. Morowali	792	SEDANG
23.7	Kab. Poso	748	SEDANG
23.8	Kota Palu	968	BESAR
23.9	Kab. Parigi Moutong	726	SEDANG
23.10	Kab. Tojo Una Una	836	BESAR
23.11	Kab. Sigi	748	SEDANG
23.12	Kab. Banggai Laut	781	SEDANG
23.13	Kab. Morowali Utara	825	BESAR
24	PROVINSI SULAWESI SELATAN	1.045	BESAR
24.1	Kab. Bantaeng	803	BESAR
24.2	Kab. Barru	968	BESAR
24.3	Kab. Bone	946	BESAR
24.4	Kab. Bulukumba	1.012	BESAR

NO.	PROVINSI/KAPUBATEN KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
24.5	Kab. Enrekang	924	BESAR
24.6	Kab. Gowa	1.034	BESAR
24.7	Kab. Jeneponto	990	BESAR
24.8	Kab. Luwu	880	BESAR
24.9	Kab. Luwu Utara	902	BESAR
24.10	Kab. Maros	814	BESAR
24.11	Kab. Pangkajene Kepulauan	1.120	BESAR
24.12	Kota Palopo	803	BESAR
24.13	Kab. Luwu Timur	726	SEDANG
24.14	Kab. Pinrang	924	BESAR
24.15	Kab. Sinjai	880	BESAR
24.16	Kab. Kepulauan Selayar	693	SEDANG
24.17	Kab. Sidenreng Rappang	748	SEDANG
24.18	Kab. Soppeng	748	SEDANG
24.19	Kab. Takalar	781	SEDANG
24.20	Kab. Tana Toraja	748	SEDANG
24.21	Kab. Wajo	880	BESAR
24.22	Kota Pare-pare	792	SEDANG
24.23	Kota Makassar	1.001	BESAR
24.24	Kab. Toraja Utara	847	BESAR
25	PROVINSI SULAWESI BARAT	1.100	BESAR
25.1	Kab. Majene	715	SEDANG
25.2	Kab. Mamuju	924	BESAR
25.3	Kab. Polewali Mandar	880	BESAR
25.4	Kab. Mamasa	913	BESAR
25.5	Kab. Mamuju Utara	836	BESAR
25.6	Kab. Mamuju Tengah	572	KECIL
26	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	869	BESAR
26.1	Kab. Buton	671	SEDANG
26.2	Kab. Konawe	880	BESAR
26.3	Kab. Kolaka	858	BESAR
26.4	Kab. Muna	532	KECIL
26.5	Kota Kendari	847	BESAR
26.6	Kota Bau-Bau	803	BESAR
26.7	Kab. Konawe Selatan	594	KECIL
26.8	Kab. Bombana	759	SEDANG
26.9	Kab. Wakatobi	630	SEDANG
26.10	Kab. Kolaka Utara	825	BESAR
26.11	Kab. Konawe Utara	473	KECIL
26.12	Kab. Buton Utara	638	SEDANG
26.13	Kab. Konawe Kepulauan	476	KECIL
26.14	Kab. Kolaka Timur	812	BESAR
26.15	Kab. Muna Barat	490	KECIL
26.16	Kab. Buton Tengah	868	BESAR
26.17	Kab. Buton Selatan	644	SEDANG
27	PROVINSI BALI	968	BESAR
27.1	Kab. Badung	860	BESAR
27.2	Kab. Bangli	710	SEDANG
27.3	Kab. Buleleng	760	SEDANG
27.4	Kab. Gianyar	860	BESAR

NO.	PROVINSI/KAPUBATEN KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
27.5	Kab. Jembrana	680	SEDANG
27.6	Kab. Karangasem	700	SEDANG
27.7	Kab. Klungkung	680	SEDANG
27.8	Kab. Tabanan	820	BESAR
27.9	Kota Denpasar	990	BESAR
28	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	814	BESAR
28.1	Kab. Bima	324	SANGAT KECIL
28.2	Kab. Dompu	384	SANGAT KECIL
28.3	Kab. Lombok Barat	864	BESAR
28.4	Kab. Lombok Tengah	984	BESAR
28.5	Kab. Lombok Timur	720	SEDANG
28.6	Kab. Sumbawa	792	SEDANG
28.7	Kota Mataram	816	BESAR
28.8	Kota Bima	732	SEDANG
28.9	Kab. Sumbawa Barat	840	BESAR
28.10	Kab. Lombok Utara	756	SEDANG
29	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	1.218	BESAR
29.1	Kab. Alor	672	SEDANG
29.2	Kab. Belu	828	BESAR
29.3	Kab. Ende	1.080	BESAR
29.4	Kab. Flores Timur	816	BESAR
29.5	Kab. Kupang	912	BESAR
29.6	Kab. Lembata	636	SEDANG
29.7	Kab. Manggarai	816	BESAR
29.8	Kab. Ngada	828	BESAR
29.9	Kab. Sikka	936	BESAR
29.10	Kab. Sumba Barat	816	BESAR
29.11	Kab. Sumba Timur	648	SEDANG
29.12	Kab. Timor Tengah Selatan	864	BESAR
29.13	Kab. Timor Tengah Utara	816	BESAR
29.14	Kota Kupang	1.140	BESAR
29.15	Kab. Rote Ndao	816	BESAR
29.16	Kab. Manggarai Barat	804	BESAR
29.17	Kab. Nagekeo	828	BESAR
29.18	Kab. Sumba Barat Daya	468	KECIL
29.19	Kab. Sumba Tengah	288	SANGAT SANGAT KECIL
29.20	Kab. Manggarai Timur	876	BESAR
29.21	Kab. Sabu Raijua	780	SEDANG
29.22	Kab. Malaka	828	BESAR
30	PROVINSI MALUKU	826	BESAR
30.1	Kab. Maluku Tenggara Barat	792	SEDANG
30.2	Kab. Maluku Tengah	672	SEDANG
30.3	Kab. Maluku Tenggara	1.162	BESAR
30.4	Kab. Buru	540	KECIL
30.5	Kota Ambon	1.080	BESAR
30.6	Kab. Seram Bagian Barat	624	SEDANG
30.7	Kab. Seram Bagian Timur	612	SEDANG
30.8	Kab. Kepulauan Aru	195	SANGAT SANGAT KECIL
30.9	Kota Tual	627	SEDANG
30.10	Kab. Maluku Barat Daya	360	SANGAT KECIL

NO.	PROVINSI/KAPUBATEN KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
30.11	Kab. Buru Selatan	516	KECIL
31	PROVINSI MALUKU UTARA	741	SEDANG
31.1	Kab. Halmahera Tengah	720	SEDANG
31.2	Kota Ternate	1.078	BESAR
31.3	Kab. Halmahera Barat	966	BESAR
31.4	Kab. Halmahera Timur	182	SANGAT SANGAT KECIL
31.5	Kab. Halmahera Selatan	1.092	BESAR
31.6	Kab. Halmahera Utara	1.274	BESAR
31.7	Kab. Kepulauan Sula	938	BESAR
31.8	Kota. Tidore Kepulauan	1.008	BESAR
31.9	Kab. Pulau Morotai	938	BESAR
31.10	Kab. Pulau Taliabu	120	SANGAT SANGAT KECIL
32	PROVINSI PAPUA	980	BESAR
32.1	Kab. Biak Numfor	672	SEDANG
32.2	Kab. Jayapura	896	BESAR
32.3	Kab. Jayawijaya	420	KECIL
32.4	Kab. Merauke	1.064	BESAR
32.5	Kab. Mimika	1.008	BESAR
32.6	Kab. Nabire	840	BESAR
32.7	Kab. Paniai	-	*) Tidak terpetakan
32.8	Kab. Puncak Jaya	-	*) Tidak terpetakan
32.9	Kab. Kepulauan Yapen	-	*) Tidak terpetakan
32.10	Kota Jayapura	1.012	BESAR
32.11	Kab. Sarmi	896	BESAR
32.12	Kab. Keerom	532	KECIL
32.13	Kab. Yahukimo	-	*) Tidak terpetakan
32.14	Kab. Pegunungan Bintang	-	*) Tidak terpetakan
32.15	Kab. Tolikara	896	BESAR
32.16	Kab. Boven Digoel	448	KECIL
32.17	Kab. Mappi	420	KECIL
32.18	Kab. Asmat	-	*) Tidak terpetakan
32.19	Kab. Waropen	532	KECIL
32.20	Kab. Supiori	-	*) Tidak terpetakan
32.21	Kab. Mamberamo Raya	-	*) Tidak terpetakan
32.22	Kab. Membramo Tengah	420	KECIL
32.23	Kab. Yalimo	420	KECIL
32.24	Kab. Lanny Jaya	252	SANGAT SANGAT KECIL
32.25	Kab. Nduga	308	SANGAT KECIL
32.26	Kab. Dogiyai	-	*) Tidak terpetakan
32.27	Kab. Puncak	-	*) Tidak terpetakan
32.28	Kab. Intan Jaya	-	*) Tidak terpetakan
32.29	Kab. Deiyai	-	*) Tidak terpetakan
33	PROVINSI PAPUA BARAT	826	BESAR
33.1	Kab. Fak Fak	1.036	BESAR
33.2	Kab. Manokwari	-	*) Tidak terpetakan
33.3	Kab. Sorong	728	SEDANG
33.4	Kota Sorong	966	BESAR
33.5	Kab. Raja Ampat	616	SEDANG
33.6	Kab. Sorong Selatan	-	*) Tidak terpetakan
33.7	Kab. Teluk Bintuni	-	*) Tidak terpetakan

NO.	PROVINSI/KAPUBATEN KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
33.8	Kab. Teluk Wondama	826	BESAR
33.9	Kab. Kaimana	392	SANGAT KECIL
33.10	Kab. Maybratpert	378	SANGAT KECIL
33.11	Kab. Tambrau	-	*) Tidak terpetakan
33.12	Kab. Manokwari Selatan	854	BESAR
33.13	Kab. Pegunungan Arfak	-	*) Tidak terpetakan
34	PROVINSI DKI JAKARTA	-	*) TIDAK TERPETAKAN
34.1	Kota Jakarta Pusat	220	SANGAT SANGAT KECIL
34.2	Kota Jakarta Timur	220	SANGAT SANGAT KECIL
34.3	Kota Jakarta Selatan	220	SANGAT SANGAT KECIL
34.4	Kota Jakarta Barat	220	SANGAT SANGAT KECIL
34.5	Kota Jakarta Utara	220	SANGAT SANGAT KECIL
34.6	Kab. Kepulauan Seribu	220	SANGAT SANGAT KECIL

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIC INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG